



News Title : Bappebti Mengajak Pelaku Usaha Minyak Kelapa Sawit Mentah Kalimantan Barat untuk Berpartisipasiaktif Bursa CPO Indonesia

Media Name : Sawitindonesia.com

Journalist : Redaksi SI

Publish Date : 08 July 2024

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Fajar Wibhiyadi (Direktur Utama ICDX)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Berita Terbaru

Topic : Bursa CPO

News - Bappebti Mengajak Pelaku Usaha Minyak Kelapa Sawit Mentah Kalimantan Barat untuk Berpartisipasiaktif Bursa CPO Indonesia

Berita Terbaru

Bappebti Mengajak Pelaku Usaha Minyak Kelapa Sawit Mentah Kalimantan Barat untuk Berpartisipasiaktif Bursa CPO Indonesia

REDAKSI SAWIT INDONESIA - 08 JUL 2024 - 0 1480000



Jakarta, Sawit Indonesia - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (minyak palm oil/CPO) Kalimantan Barat untuk berpartisipasiaktif dalam transaksi Bursa CPO Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia agar semakin likuid, dipercaya, dan meningkatkan harga pasar. Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Kasan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi Bursa CPO Indonesia Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (4/7).

Tuan Rudi Dediatur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama Indonesia Clearing House (CPO) 'Indonesia Sejahtera, Direktur ICDX Nurulaini, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Manurupak Manurung, dan Kepala Bidang Pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hubungan Internasional Dewan Pengawas Pasar (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Djono Albar Burhan.

"Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia. Pelaku usaha CPO diharapkan untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun seoptimalnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia," ujar Kasan.

Kasan mengungkapkan, Literasi Bursa CPO di Pontianak yang bertema "Kapita Tuntas Bursa CPO Indonesia" merupakan kegiatan literasi tempat yang dilaksanakan Bappebti tahun ini. Berdasarkan itu, juga bisa sebelumnya yang digelar saat acara dalam kegiatan literasi serupa di Kota Samarinda, Medan, dan Pekanbaru. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk memulihkan literasi dan edukasi yang masih belum implementasi Bursa CPO Indonesia.

Baca juga: DSN Group Mendukung Pemberdayaan Perempuan Dalam Mempromosikan Kemudahan Ekonomi Masyarakat

"CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dipromosikan. Untuk itu, Bappebti mempromosikan Bursa CPO Indonesia yang direncanakan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO," imbuh Kasan.

Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membantu harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandem buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, agar harga acuan bidirektif yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat. Harga acuan yang akurat sangat penting sebagai pemastian harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

"Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia tentu menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan bidirektif. Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan hargaTBS. Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan bidirektif," ungkap Kasan.

Kasan mengungkapkan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO kasat mata di Bursa CPO Indonesia mencapai 17.366 ton atau Rp 780 triliun pada Januari - Juni 2024. Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD 2,53 miliar. Nilai tersebut naik 7,7 persen (MOM) dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar.

"Salah satu pendorong surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD 1,08 miliar," tutur Kasan.

Baca juga: Stock Piyak Bersubstansi di Kalbar Disajikan Animo

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menyatakan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk pengoptimalan transaksi perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat meningkatkan harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut karena harga yang tercapai Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.

Olvy melanjutkan, Bursa CPO Indonesia dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Undang-undang tersebut mengayaukan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan Peraturan Bappebti (Perhal) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya. "Kejelasan perdagangan CPO melalui bursa CPO Indonesia beresiko untuk pasar dalam negeri. Namun, dalam pembentukannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global," imbuh Olvy.

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan, manfaat adanya Bursa CPO Indonesia tentu dapat dirasakan kepada seluruh pelaku usaha CPO. Untuk itu, ICDX berkolaborasi dengan seluruh pemangku-kepentingan untuk memberikan literasi kepada para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.

"Kejelasan literasi ini sejalan dengan program sosialisasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya Pontianak, diharapkan memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa sehingga semakin banyak pelaku usaha yang bertransaksi CPO di bursa," ujar Fajar.

Baca juga: Komitmen Pemerintah Hadapi Perubahan Iklim

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI Manurupak Manurung mengungkapkan anggota GAPKI untuk turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini agar para anggota GAPKI bisa memperoleh harga TBS dan CPO di dalam bursa.

"Kalimantan Barat memang menjadi produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang ikut mendorong harga dalam Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif bertransaksi agar ikut merencanakan harga TBS dan CPO di dalam bursa," ungkap Manurupak.

Kepala Bidang SDM dan Hubungan Internasional DPP APKASINDO Djono Albar Burhan mendukung adanya Bursa CPO di Indonesia. Kehadiran Bursa CPO Indonesia berdampak bagi petani kelapa sawit karena produk TBS yang dihasilkan petani kelapa sawit menjadi produk hulu dari CPO. Pemangku hargaTBS diharapkan mampu pada harga acuan CPO di Bursa sehingga pemastian harga TBS menjadi lebih wajar dan transparan.

"Setelah adanya Bursa CPO Indonesia, harga TBS relatif semakin stabil. Keterlibatan harga ini merupakan hal yang diharapkan para petani kelapa sawit," terang Djono.

Djono mengungkapkan, perlunya Bursa CPO Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan bursa minyak ini kelapa sawit (palm kernel oil/PKO). Hal ini karena PKO juga menjadi faktor penentu harga TBS. Selain itu, bursa diharapkan menjadi perantara kelapa sawit sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.

Sumber: kementerian.go.id